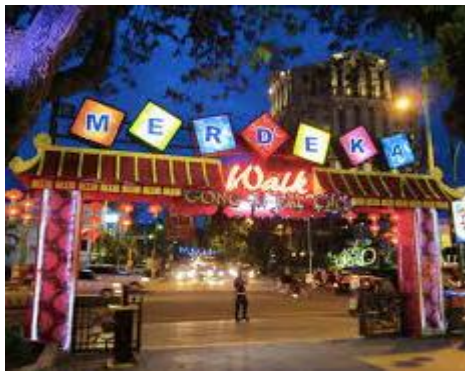




**SENSITIVITAS MAKROFISKAL PERKIRAAN
DAMPAK FISKAL DARI RANCANGAN
KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI FISKAL
UNTUK MENCAPAI TUJUAN FISKAL DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



PEMERINTAH KOTA MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun Kajian Analisis Sensitivitas Makrofiskal Perkiraan Dampak Fiskal dari Rancangan Kebijakan dan Strategi Fiskal untuk Mencapai Tujuan Fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Kajian ini merupakan analisis komprehensif yang memuat kemampuan keuangan daerah Kota Medan, Sensitivitas dan Tekanan Fiskal APBD Kota Medan yang dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Kajian ini merupakan analisis perencanaan daerah Kota Medan yang dirancang sebagai dasar bagi Walikota dan Wakil Walikota dalam mendukung visi dan misi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan untuk dapat memahami dan menjalankan rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian analisis ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kajian analisis ini.

Demikian dan terima kasih.

Medan, Juni 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.3. Tujuan	7
1.4 Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Desentralisasi Fiskal	9
2.2 Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi	13
2.3 Tekanan Fiskal (Fiscal Stress).....	15
2.4 Pengaruh Tekanan Fiskal terhadap Pertumbuhan PAD	19
2.5 Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.6 Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah.....	25
2.7 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemampuan Keuangan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Data dan Sumber Data	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Metode Analisis.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Kondisi Makro Ekonomi Kota Medan	41
4.2. Deskripsi Data Penelitian	71

4.2. Kemampuan Keuangan Daerah	79
4.3 Uji Asumsi Klasik	84
4.4 Uji Hipotesis Statistik	91
4.5 Koefisien Sensitivitas APBD Kota Medan	93
4.6 Tekanan Fiskal APBD Kota Medan	98
4.7 Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Pendapatan APBD	100
4.8 Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap PAD Kota Medan	105
4.9 Analisis Proyeksi Kemandirian Fiskal Kota Medan	109
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Rekomendasi.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Medan (juta Rp.)	4
Tabel 1. 2. Distribusi Komponen Pendapatan dan Belanja Kota Medan (%)	6
Tabel 4. 1. PDRB Harga Berlaku Kota Medan (Juta Rupiah)	42
Tabel 4. 2. PDRB Harga Konstan Kota Medan (Juta Rupiah)	44
Tabel 4. 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan (%)	45
Tabel 4. 4. PDRB Perkapita Kota Medan	48
Tabel 4. 5. Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi	50
Tabel 4. 6. Inflasi Kota Medan Menurut Komponen Pengeluaran	51
Tabel 4. 7. Profil Ketenagakerjaan Kota Medan	53
Tabel 4. 8. Jenis Pekerjaan Penduduk Usia 15+ yang Bekerja di Kota Medan	55
Tabel 4. 9. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Kota Medan	56
Tabel 4. 10. Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Kota Medan	70
Tabel 4. 11. Incremental Capital Output Ratio Kota Medan	70
Tabel 4. 12. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan	72
Tabel 4. 13. Pertumbuhan Transfer Provinsi Kota Medan	75
Tabel 4. 14. Pertumbuhan Transfer Pusat Kota Medan	76
Tabel 4. 15. Pendapatan Total dan Belanja Total	77
Tabel 4. 16. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	78
Tabel 4. 17. Kontribusi Komponen APBD Kota Medan	80
Tabel 4. 18. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	81
Tabel 4. 19. Rasio Efektivitas PAD	82
Tabel 4. 20. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	83
Tabel 4. 21. Hasil Uji Normalitas Model Sensitivitas	84
Tabel 4. 22. Hasil Uji Normalitas Model Tekanan Fiskal	85
Tabel 4. 23. Hasil Uji Normalitas Model Pendapatan APBD	85
Tabel 4. 24. Hasil Uji Normalitas Model PAD	85
Tabel 4. 25. Hasil Uji Multikolinieritas Model Sensitivitas	86
Tabel 4. 26. Hasil Uji Multikolinieritas Model Tekanan Fiskal	86
Tabel 4. 27. Hasil Uji Multikolinieritas Model Pendapatan	87
Tabel 4. 28. Hasil Uji Multikolinieritas Model PAD	87
Tabel 4. 29. Hasil Uji Autokorelasi Model Sensitivitas	88
Tabel 4. 30. Hasil Uji Autokorelasi Model Tekanan Fiskal	88
Tabel 4. 31. Hasil Uji Autokorelasi Model Pendapatan	89
Tabel 4. 32. Hasil Uji Autokorelasi Model PAD	89
Tabel 4. 33. Hasil Uji Heterokedastisitas Model Sensitivitas	90
Tabel 4. 34. Hasil Uji Heterokedastisitas Model Tekanan Fiskal	90
Tabel 4. 35. Hasil Uji Heterokedastisitas Model Pendapatan	90

Tabel 4. 36. Hasil Uji Heterokedastisitas Model PAD	91
Tabel 4. 37. Uji Hipotesis Statistik	92
Tabel 4. 38. Koefisien Sensitivitas APBD Kota Medan	93
Tabel 4. 39. Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tekanan Fiskal	98
Tabel 4. 40. Pengaruh Makroekonomi terhadap Pendapatan Kota Medan	101
Tabel 4. 41. Pengaruh Makroekonomi terhadap PAD Kota Medan	105
Tabel 4. 42. Indikator Kemandirian Fiskal Kota Medan	109
Tabel 4. 43. Koefisien Indikator Pendapatan terhadap Defisit APBD.....	110
Tabel 4. 44. Proyeksi Indikator Pendapatan terhadap Defisit APBD.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan dan Sumatera Utara	46
Gambar 4. 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	47
Gambar 4. 3. Pendapatan Perkapita Kota Medan dan Sumatera Utara	48
Gambar 4. 4. Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Sumut	51
Gambar 4. 5. TPAK dan TPT Kota Medan	53
Gambar 4. 6. TPT Kota Medan dan Sumut (persen).....	54
Gambar 4. 7. Kondisi Kemiskinan Kota Medan.....	57
Gambar 4. 8. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	58
Gambar 4. 9. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan	58
Gambar 4. 10. Perbandingan Ketimpangan Pendapatan	59
Gambar 4. 11. Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Sumut Tahun 2020.....	60
Gambar 4. 12. Perkembangan IPM Kota Medan	61
Gambar 4. 13. IPM Kab/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020.....	62
Gambar 4. 14. IPM Kab/Kota di Indonesia Tahun 2020.....	63
Gambar 4. 15. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Medan	64
Gambar 4. 16. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Medan.....	64
Gambar 4. 17. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Medan.....	65
Gambar 4. 18. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Medan.....	66
Gambar 4. 19. Jumlah Simpanan Kota Medan dan Sumatera Utara	67
Gambar 4. 20. Pertumbuhan Simpanan Kota Medan dan Sumatera Utara.....	68
Gambar 4. 21. Jumlah Kredit Kota Medan dan Sumatera Utara	68
Gambar 4. 22. Pertumbuhan Kredit Kota Medan dan Sumatera Utara	69
Gambar 4. 23. Perbandingan ICOR Kota Besar di Indonesia.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting yang diyakini dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang ini sudah berjalan sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 1999, yang diganti melalui UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, dan diganti kembali melalui UU Nomor 23 tahun 2014, mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua Peraturan tersebut mempunyai semangat dalam memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat, daerah, dan antar daerah, potensi setiap daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan. Penggantian Undang-Undang dilakukan lebih kepada perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perjalanan otonomi daerah Pemerintahan Kota Medan yang sedang bergulir hingga saat ini perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan proyeksi ke depannya. Terutama, mengenai proses kemampuan keuangan dalam membiayai tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Postur pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan transfer dari pemerintah daerah

perlu dilihat lebih detail terkait kinerjanya terhadap APBD dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Belanja daerah juga perlu diarahkan dalam rangka memperkuat perekonomian yang sedang berjalan. Monitoring dan evaluasi dari sisi pendapatan maupun belanja sebagai representasi dari input dapat digunakan untuk memperkuat output, keluaran, dan dampaknya terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Meski bervariasi bobot perannya di tiap daerah menurut tingkat perkembangan ekonomi dan kemajuan masing-masing, secara umum APBD menjadi sumber bagi pembiayaan layanan publik dan menjadi stimulus Bergeraknya ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang lesu dan mengalami perlambatan, APBD menjadi modalitas sektor publik untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

APBD, sebagai suatu produk kebijakan, mencerminkan politik anggaran suatu daerah. Dari sana mengalir rumusan terkait arah pembangunan dan skala prioritas yang pada gilirannya diturunkan pada level program dan kegiatan pada suatu kurun tahun fiskal. Secara normatif, penetapan prioritas-prioritas tersebut diambil dalam kerangka kepentingan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas hidup/kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah harus memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai

daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. UU No. 28 tahun 2009 merupakan peraturan yang memuat pajak daerah dan retribusi daerah.

Masalah utama dalam kebijakan fiskal daerah terletak pada kapasitas dan mutu tata kelola keuangan daerah yang masih rendah. Hal ini, antara lain, ditunjukkan indikator kemandirian daerah, rasio belanja daerah, dan ruang fiskal daerah. Perihal kemandirian daerah, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa secara nasional proporsi dana perimbangan masih dominan setiap tahun anggaran di banyak kabupaten/kota di mana lebih dari 60% APBD bersumber dari dana perimbangan. Alih-alih berbicara kemandirian otonomi fiskal, banyak daerah justru masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat dalam mengelola rumah tangganya. Dalam rasio belanja daerah, terlihat masalah yang juga serius adalah masih dominannya belanja pegawai dengan proporsi sebesar 43,75%, sedangkan belanja modal rerata hanya 23,92% (KPPOD, 2014). Sementara terkait ruang fiskal tampak bahwa tingkat diskresi pemda dalam membelanjakan anggaran cenderung menurun sepanjang 2007- 2014. Penurunan ruang fiskal ini menunjukkan struktur kesempatan dan fleksibilitas daerah dalam menggunakan anggaran untuk kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit. Kondisi tersebut praktis membuat belanja daerah akan sangat tergantung kepada volatilitas dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berubahnya kebijakan transfer daerah oleh pemerintah pusat akan memberikan dampak terhadap perubahan bagi belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Kota Medan berupaya untuk mengoptimalkan secara upaya dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 1. 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Medan (juta Rp.)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	1.535.309	1.739.756	1.636.204	1.829.665	1.509.483
Pendapatan transfer	2.772.807	2.669.308	2.617.414	3.401.878	2.478.930
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55,37	65,18	62,51	53,78	60,89

Sumber: BPKAD Kota Medan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kemandirian keuangan daerah Kota Medan berfluktuasi dalam range 53,8% hingga 65,2%. Keberhasilan Pemerintah Kota Medan dalam mendapatkan hasil yang optimal dalam PAD, memberikan dampak terhadap peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Pada tahun 2017, RKKD Kota Medan mencapai rasio tertinggi yaitu 65,18% dan pada tahun 2019, RKKD Kota Medan mencapai 53,78%. Pada tahun 2020, RKKD Kota Medan mencapai 60,89% mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 53,78%. Walaupun PAD Kota Medan tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak Pandemi Covid-19, namun berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang menurun dalam jumlah lebih besar menyebabkan RKKD Kota Medan meningkat. Capaian ini memberikan gambaran bahwa secara kemandirian fiskal, Kota Medan memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi guncangan fiskal akibat adanya guncangan ekonomi. Potensi dari beberapa sektor ekonomi di Kota Medan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah perlu terus digali dan disesuaikan melalui seni regulasi yang merangsang kemampuan maupun kemauan membayar dari

para pelaku ekonomi. Hipotesa yang berkembang yaitu peningkatan kemampuan keuangan daerah merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang dibutuhkan saat ini adalah bertambahnya produksi barang dan jasa karena semakin banyak orang yang bekerja. Pada poin ini, pertumbuhan ekonomi adalah eksis. Penguatan belanja modal tepat sasaran yang berorientasi kepada peningkatan PAD kedepannya merupakan pilihan jitu untuk menghindari indikasi *flypaper effect*. Kajian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah terhadap APBD Kota Medan, dan kemampuan keuangan daerah sebagai proksi dari proses kemandirian Pemerintah Kota Medan dalam membiayai program-program kerja yang telah ditetapkan.

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan *fiscal stress* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah krisis, dari segi tingkat ketergantungan secara relatif

menunjukkan perkembangan yang positif sesudah krisis. Penelitian lain terkait dengan fiscal stress dilakukan oleh Andayani (2004). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan rata-rata pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya krisis. Pada masa krisis ekonomi, rata-rata pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan daerah yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi *fiscal stress* (tekanan keuangan), sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1. 2. Distribusi Komponen Pendapatan dan Belanja Kota Medan (%)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD (Derajat desentralisasi)	35,6	39,5	38,5	33,2	36,6
Pendapatan dari pusat	44,1	48,1	50,7	39,1	49,9
Pendapatan dari provinsi	12,4	12,4	9,2	22,6	10,0
Belanja operasi	79,3	77,3	82,0	80,3	88,1
Belanja modal	20,7	22,7	18,0	19,7	21,9

Sumber: BPKAD Kota Medan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan adalah dengan membangun sarana dan prasarana yang dibelanjai daerah melalui belanja modal. Belanja modal ini diharapkan akan memiliki manfaat dalam jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Belanja modal dalam APBD Kota Medan masih dalam kisaran 18,0% hingga 22,8%. Peningkatan belanja modal dalam APBD Kota Medan diharapkan menjadi upaya strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Sebagian dari belanja modal Kota Medan dibiayai oleh dana transfer pemerintah pusat baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus. Volatilitas atas penerimaan dari pemerintah atasan akan berdampak terhadap perubahan pada belanja

operasional dan belanja modal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi capaian target pembangunan yang telah dirancang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun. Untuk menindaklanjuti sensitivitas belanja daerah atas dana transfer dari pemerintah atasan, Pemerintah Kota Medan perlu dilakukan kajian dengan judul Prediksi Sensitivitas Makrofiskal Perkiraan Dampak Fiskal dari Rancangan Kebijakan dan Strategi Fiskal untuk Mencapai Tujuan Fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021.

1.2 Permasalahan

Persoalan penelitian yang dapat dirumuskan dari gambaran latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi dan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap APBD Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PAD dan belanja modal terhadap tekanan fiskal Pemerintah Kota Medan?
4. Bagaimana pengaruh sensitivitas makrofiskal atas perkiraan dampak fiskal dari rancangan kebijakan dan strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat, provinsi dan pendapatan asli daerah serta pertumbuhan ekonomi terhadap APBD Kota Medan;
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan PAD dan belanja modal terhadap tekanan fiskal Pemerintah Kota Medan.
4. Untuk menganalisis sensitivitas makrofiskal atas perkiraan dampak fiskal dari rancangan kebijaksanaan dan strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021.

1.4 Manfaat

Kajian ini memberikan manfaat:

1. Tersusunnya analisis sensitivitas makrofiskal atas perkiraan dampak fiskal dari rancangan kebijaksanaan dan strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
2. Memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Medan dalam memprediksi target pembangunan daerah berbasis kepada belanja fiskal.
3. Memberikan informasi terhadap proyeksi pendapatan asli daerah dan dana transfer pemerintah atasan untuk mencapai kemandirian fiskal Kota Medan yang lebih baik.